



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGOCH HADI NOEGROHO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **209576**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **962.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/238 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 870.000.000
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 92.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **671.900.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, WARISAN Rp. 3.900.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA R SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
3. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV 1.5T RS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 512.000.000
5. MOBIL, SUZUKI KATANA STD/DX SHORT 2WD Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
6. MOTOR, VESPA PRIMAVERA I GET 150 ABS A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **321.500.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **49.233.664**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.004.633.664**



III. HUTANG

Rp. 577.217.961

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.427.415.703

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.